



**PERADILAN RESTORATIF :
MODEL PERADILAN ANAK INDONESIA
MASA DATANG**

PIDATO PENGUKUHAN

**Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar
Dalam Bidang Kriminologi, pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

Semarang, 18 Februari 2006

**Oleh :
PAULUS HADISUPRAPTO**

**PERADILAN RESTORATIF :
MODEL PERADILAN ANAK INDONESIA
MASA DATANG**

Paulus Hadisuprpto

PIDATO PENGUKUHAN

**Diucapkan pada Upacara Penerimaan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 18 Februari 2006**

Cetakan Pertama, 2006

Diterbitkan oleh :

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

ISBN : 979.704.376.2

**“Percayalah kepada Tuhan seakan-akan
seluruhnya tergantung kepadamu, dan
kerjakanlah sekuat tenagamu seakan-akan
seluruhnya tergantung pada Tuhan”
(St. Ign. De Loyola)**

**“Saya bukan siapa-siapa,
saya hanya pensil kecil di tangan Tuhan,
Dia yang berpikir, Dia yang menulis,
Pensil tidak bisa apa-apa, ia hanya digunakan,
saya merasa Tuhan ingin memperlihatkan
kebesaran-Nya
dengan menggunakan ketiadaan”
(Ibu Teresa)**

**“Cara masyarakat memperlakukan anak-anak,
tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya
melindungi anak-anak, melainkan mencerminkan
juga perasaan keadilan dan komitmennya
terhadap masa depan mereka serta niatnya
untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan
generasi penerus suatu bangsa”
(Javier Perez de Cuellar)**

Yang saya hormati,

Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro,

Sekretaris Senat Universitas Diponegoro,

Para anggota Senat dan Dewan Guru Besar Undip

Para anggota Dewan Penyantun Undip

Para Guru Besar dari luar Undip

Para Anggota Muspida Daerah Tingkat I Prop. Jawa Tengah.

Para Pembantu Rektor Undip

Para Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga di Lingkungan Undip

Para Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Diponegoro

Seluruh Sivitas Akademika Undip

Rekan-rekan staf pengajar dan administrasi di lingkungan Undip

Para tamu undangan yang saya muliakan dan

Para Mahasiswa yang saya cintai.

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam Sejahtera, semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita di hari ini dan di hari-hari mendatang.

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa terlebih dahulu saya sampaikan, karena kasih dan anugerah-Nya telah memperkenalkan kita semua berkumpul di sini, dan saya diberi-Nya perkenan untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya.

Terima kasih yang amat dalam dan tulus saya sampaikan kepada Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro yang

telah berkenan memimpin rapat senat terbuka dengan mengundang berbagai pihak dalam rangka penyampaian pidato pengukuhan saya pada hari ini. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan hormat dan terima kasih saya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro dalam bidang kriminologi pada hari yang berbahagia ini.

Hadirin yang saya hormati.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dalam perkembangannya selalu saja memberikan sumbangannya kepada hukum pidana. Kriminologi adalah "sosiologi hukum pidana", ia memberikan pemamahan-pemahaman sosiologis terhadap kejahatan dan proses pembentukan hukum serta penegakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Pidato saya hari ini tidak jauh dari kerangka pikir tersebut, perhatian terutama difokuskan pada kajian kriminologis terhadap fenomena perilaku delinkuensi anak dan penanggulangannya di masyarakat, baik melalui sarana penal maupun nonpenal. Saya ingin menunjukkan bahwa telaah kritis kriminologi terhadap ketentuan perundang-undangan yang melandasi penanggulangan perilaku delinkuensi anak dengan sarana penal (*Ius Constitutum*) beserta praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen (*Ius*

Operatum) dalam masyarakat, dapat memberikan sumbangan bagi upaya penanggulangan perilaku delinkuensi anak baik melalui sarana penal maupun nonpenal.

Secara khusus saya ingin mengetengahkan kajian kriminologis terhadap (a) Kelemahan Substantif Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar hukum penanganan anak pelaku delinkuen di Indonesia, (b) Kelemahan Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek penanganan anak delinkuen di masyarakat, dan kemudian dari pada itu (c) Usulan model alternatif peradilan pidana anak dalam kerangka penanggulangan perilaku delinkuensi anak di masyarakat.

Pendahuluan **Hadirin yang saya hormati,**

Perilaku delinkuensi anak di Indonesia, masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delinkuensi anak seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, pembajakan bis oleh pelajar, muncul ke permukaan. Gejala tersebut tampaknya selalu saja menunjukan dirinya sebagai masalah aktual yang khas di setiap zamannya dan karenanya menjadi menarik untuk ditelaah.

Gejala tersebut mendorong perlunya dilakukan

pemahaman secara proporsional terhadap perilaku delinkuensi anak, utamanya terhadap usaha-usaha penanggulangannya selama ini di masyarakat.

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya dan delinkuensi anak pada khususnya, membawa pembicaraan ini pada Kebijakan Kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu (a) Kebijakan Kriminal Jalur Penal dan (b) Kebijakan Kriminal Jalur Nonpenal¹. Secara kasar, dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penumpasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan jalur nonpenal, lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan perbedaan secara kasar, karena pada hakikatnya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²

Hadirin yang saya hormati,

Mempertimbangkan (a) keterbatasan penggunaan

jalur penal dalam penanggulangan delinkuensi anak, lebih mencerminkan sifatnya sebagai *kurieren am symptom* (pengobatan simptomatik) daripada “pengobatan kausatif”³; (b). hasil pengamatan praktek-praktek pendekatan justisial konvensional cenderung merugikan masa depan anak stigmatisasi anak (stigmatisasi anak secara kriminologi merupakan faktor kriminogen) dan (c) semakin gencarnya tuntutan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan hak-hak anak (termasuk hak-hak anak pelaku delinkuen), antara lain tampak dari Resolusi PBB 44/25 – *Convention of the Rights of the Child (CRC)* ditetapkan berlaku di Indonesia dengan Keppres No. 36 tahun 1990, Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rule)*; Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard of the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*; dan Resolusi PBB 45/110 – *The Tokyo Rule*, maka cukup berasalan kiranya apabila dinyatakan bahwa upaya penanggulangan delinkuensi anak, seyogyanya diusahakan cara-cara yang lebih mengedepankan “kepentingan terbaik anak” (*the best interest of the child*), tanpa kehilangan maknanya sebagai upaya pengendalian terhadap terjadinya gejala tersebut di masyarakat. Dengan kata lain, harus ada

upaya untuk mengedepankan hak-hak anak delinkuen sekaligus mencegah terjadinya stigmatisasi pada diri anak dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak di masyarakat.

Telaah akademis kriminologis yang erat kaitannya dengan perbincangan penanganan anak delinkuen di masyarakat, menghasilkan model-model peradilan yang lazimnya diterapkan dalam penanganan anak delinkuen. Model-model peradilan itu adalah (a) model retributif, (b) model pembinaan pelaku secara individual dan (c) model restoratif. Model peradilan anak "retributif dan "pembinaan pelaku secara individual" tampaknya tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai berkembangnya sistem peradilan anak. Model "retributif dan "pembinaan pelaku secara individual" hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individual anak pelaku delinkuen, kepentingan korban dan masyarakat tak tersentuh.⁴

Memperhatikan pada satu sisi kebutuhan penanganan anak delinkuen di masyarakat yang membekaskan stigma pada diri anak, dan tuntutan masyarakat internasional tentang perlunya perlindungan hak-hak anak delinkuen, serta adanya pemikiran model-model peradilan anak pada sisi lain, maka pidato pengukuhan saya ini mengemukakan pokok bahasan

tentang (a) Kelemahan Substantif UU No. 3 tahun 1997 sebagai dasar hukum penanganan anak delinkuen, (b) Kelemahan Pelaksanaan UU No. 3 tahun 1997 dalam kerangka penanggulangan delinkuensi anak di masyarakat dan (c) Usulan alternatif model peradilan pidana anak Indonesia masa datang. Telaah pokok bahasan tersebut selanjutnya diabstraksikan dalam satu judul “Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang”

Hadirin yang saya hormati,

**Perbandingan
Hukum**

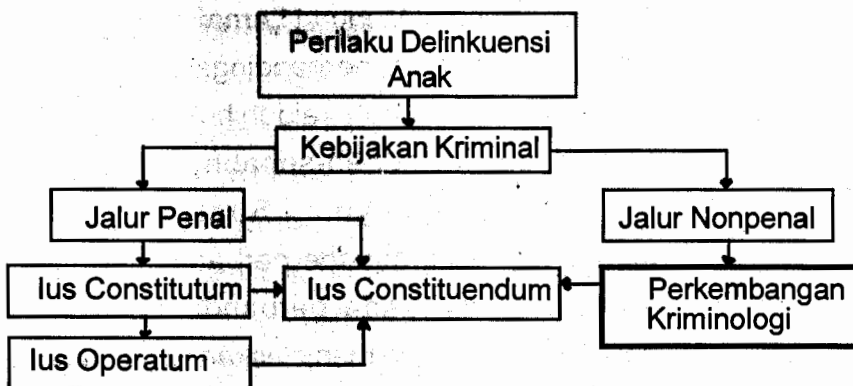
Pembahasan pokok-pokok bahasan tersebut dilakukan dengan menerapkan metode **perbandingan hukum** (*comparative law methods*). Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Menurut **Lemaire**, seperti dikutip oleh Romli Atmasasmita, perbandingan hukum mempunyai lingkup : isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.⁵ **Soerjono Soekanto** mengemukakan, metode perbandingan hukum tidak membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, tetapi juga menjelaskan tentang fungsinya atau efektivitas hukum (metode sosiologis) dan pemahaman tentang perkembangan dari hukum yang

diperbandingkan (metode sejarah).⁶

Metode perbandingan hukum diterapkan dalam pembahasan ini dengan dasar pemikiran, bahwa perbandingan hukum dapat berfungsi (a) sebagai sarana dalam kegiatan penelitian di bidang falsafah dan sejarah hukum (b) sebagai pengayaan (*enrichment*) pemahaman dan pengembangan hukum nasional masing-masing negara⁷

Untuk memperjelas proses berpikir sajian ini, dikemukakan *kerangka pikir sajian dalam ragaan berikut ini.*

Ragaan I Kerangka Pikir Sajian



Hadirin yang saya hormati,

Proses

Stigmatisasi

Peradilan

Pidana Anak

Indonesia

Saya akan mengetengahkan analisis kritis dasar hukum penanganan anak delinkuen beserta implementasinya dalam praktik penanganan anak delinkuen dikaitkan dengan azas-azas dasar penghormatan hak-hak anak delinkuen seperti tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990).

**Ius Constitu-
tum.**

Ketentuan

Substantif UU

No. 3/1997

tentang

Pengadilan

Anak

Untuk menangani perkara pidana yang tersangka / terdakwa anak-anak, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak), dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3688, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1997.

Pertimbangan utama diundangkannya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini antara lain ialah kehendak Pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana secara lebih baik daripada yang terdahulu dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Dengan lahirnya UU Pengadilan Anak tersebut diharapkan petugas hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan, semuanya mendalami masalah anak, agar anak setelah perkaranya diputus secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Keberadaan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Oleh karena itu hubungan antara UU Pengadilan Anak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Ini berarti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana ("pakem") yang terkandung di dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk UU Pengadilan Anak.

UU No. 3 tahun 1997 menggunakan istilah "Pengadilan Anak" bukan "Peradilan Anak"

merupakan hasil proses panjang perbincangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan UU tersebut semula memakai istilah UU tentang Peradilan Anak, karena UU ini nantinya dapat dijadikan landasan hukum penanganan semua perkara yang menyangkut anak (bukan hanya perkara pidana anak saja). Pemikiran yang muncul dalam perdebatan di DPR waktu itu, (menyangkut penggantian istilah “peradilan anak” menjadi “pengadilan anak”) didasarkan pertimbangan, istilah “peradilan” menunjukkan lingkungan badan peradilan, di Indonesia ada empat lingkungan peradilan (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, lihat kemudian Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru). Sementara istilah “pengadilan” lebih mengacu pada fungsi badan peradilan. Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya, UU No. 3 tahun 1997 pada akhirnya tidak mencerminkan peradilan yang

lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak saja.⁸

Hadirin yang saya hormati,

Ketentuan Pokok yang terkandung di dalam UU No. 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri atas (1) Pembatasan Umur orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak, antara 8 – 18 tahun (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat 1); (2) Ruang Lingkup masalah dibatasi hanya menyangkut masalah perkara anak nakal (Pasal 1 ayat 2); (3) Ditangani oleh Pejabat Khusus, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, yaitu penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak (Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7); (4) Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela, berperan penting dalam pengadilan anak (Pasal 1 ayat 11); (5) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1); (6) Keharusan *Splitsing*, bila ternyata anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, penangananannya dipisahkan (Pasal 7); (7) Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat 1); (8) Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 11, 14 dan 18); (9) Masa Penahanan lebih singkat (Pasal 44 s/d 49) dan (10)

Hukuman lebih Ringan, maksimum hukuman 10 tahun (Pasal 22 s/d 32).

Kewenangan Sidang Anak hanya memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. (Pasal 21). Bagi anak nakal dapat dijatuhkan sanksi, pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Pidana Tambahan terdiri atas pidana perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti kerugian (Pasal 23, 28, 29, 30 dan 32). Tindakan terdiri atas pengembalian anak pada orang tua, penyerahan anak pada negara atau penyerahan anak kepada Departemen Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, di samping itu ditambahkan juga teguran dan syarat tambahan lain. (Pasal 24).

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari (a) Pembimbing Kemasyarakatan, (b) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan (c) Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Pasal 33). Pembimbing Kemasyarakatan, adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan

(BAPAS) bertugas melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. (Pasal 1 angka 11). Petugas Kemasyarakatan bertugas (a) membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (b) membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 34 ayat 1). Petugas Sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Di dalam pelaksanaannya Petugas Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 ayat 3). Pekerja Sosial Sukarela (seperti LSM) yang memiliki pengetahuan, dan kemampuan dan minat membantu anak nakal ditugaskan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial dari Departemen Sosial (Pasal 39 ayat 1).⁹

Itu berarti bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, dalam perkara sidang anak, mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, karena kini kedudukan BAPAS tidak sepenuhnya berada di “lini belakang” dalam mata rantai proses pemidanaan anak, melainkan sudah sejak awal di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut peranannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku delinkuen. Perubahan peran ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia (*staffing*) dan peningkatan SDM petugas BAPAS di masa datang

Dari paparan ketentuan substantif UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di atas, tampak bahwa UU memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim (anak) dalam proses pemidanaan (anak), dibandingkan dengan peran penyidik, penuntut umum. Sementara sistem peradilan anak negara lain, posisi “kunci” sistem peradilan anak berada di tangan Penuntut Umum, bukan pada Hakim. Penekanan posisi “kunci” yang berbeda terhadap peran hakim dan penuntut umum ini sudah barang tentu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pembenahan sistem peradilan pidana anak di masa datang.

Telaah terhadap ketentuan substantif UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak mengatur tentang **diversi**. Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional Seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11* Resolusi PBB 40/33, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, berikut ini. ¹⁰

"Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practise serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. Thus diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especialy the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner."

Hadirin yang saya hormati,

Diversi, sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuen ini, diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Resolusi PBB 40/33, dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak di berbagai negara (Amerika Serikat, Inggris, Negeri Belanda, Australia, Selandia Baru dan Jepang), semuanya mengatur diversi dalam penanganan anak pelaku delinkueni. Dari sisi perlindungan kepentingan terbaik anak, rasanya keberadaan diversi ini sangat diperlukan, karena melalui diversi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas terdakwa pun tak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri anak pun tak terjadi.¹¹

Di Indonesia apabila diversi dimungkinkan dalam penanganan anak delinkuen, pejabat hukum manakah yang akan diberikan kewenangan untuk diversi ini? Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim? Hal ini mengingat bahwa dalam proses pemidanaan (anak) posisi kunci

lus Operatum
Implementasi
UU No.3/1997
tentang
pengadilan
anak

berada di tangan hakim bukan di tangan Penuntut Umum, seperti di negara-negara lain.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk melengkapi gambaran konkrit proses peradilan pidana anak di masyarakat, di bawah ini dikemukakan paparan deskriptif analitis implementasi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penanganan anak-anak delinkuen di dua kota besar di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kotamadia "Siera" dan "Sigma". Paparan hasil penelitian praktek penyelenggaraan pengadilan anak di dua wilayah Jawa Tengah paling tidak dapat diperoleh gambaran praktik penerapan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara lebih luas di masyarakat ¹²

Penelitian dilakukan terhadap 200 anak pelaku delinkuen yang menjadi klien BAPAS dari ke dua lokasi penelitian tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 200 anak pelaku delinkuen yang menjadi klien BAPAS semuanya adalah pelajar, sebagian besar berpendidikan SLTP (51 %); berpendidikan SD (31%) dan SMU (18%). Sebagian besar berumur

antara 12-17 tahun (81%), sisanya berumur di atas 17 tahun. Mereka berurusan dengan petugas hukum karena melakukan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap badan/nyawa, tindak pidana merusak fasilitas umum (*vandalism*) dan tindak pidana di bidang lalu lintas. Dari jenis tindak pidana yang diperbuat klien BAPAS ini sebagian besar tindak pidana merusak fasilitas umum dan lalu lintas, sedangkan pelaku tindak pidana terhadap badan/nyawa hanya 6,%. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada mereka secara garis besar dapat dibedakan atas dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan, Jenis sanksi yang dijatuhkan pada mereka tampaknya lebih didominasi sanksi pidana (80%), dibandingkan dengan yang dijatuhi sanksi tindakan (20%). Dari mereka yang dijatuhi pidana sebagian besar berupa pidana penjara (62%), sisanya (18%) dijatuhi pidana bersyarat. Sementara mereka yang dijatuhi sanksi tindakan umumnya berupa pengembalian pada orang tua (13%), sisanya (7%) dikenakan tindakan berupa penyerahan anak kepada negara untuk dididik (anak negara).

Pada saat yang bersamaan dengan penelitian di atas, pengamatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo (satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan bagi anak pelaku delinkuen untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), ternyata anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan bersangkutan jumlahnya tidak sama dengan jumlah anak-anak yang dijatuhi sanksi pidana yang berasal dari dua lokasi penelitian di Jawa Tengah tersebut. Jumlah anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan lebih sedikit dan itupun berasal dari kasus tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa anak-anak pelaku delinkuen yang dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan di dua lokasi penelitian itu pembinaannya tidak dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Kutoarjo. Lalu dimanakah mereka itu dibina ? Satu-satunya jawaban ialah bahwa anak-anak pelaku delinkuen itu dibina di tempat pembinaan untuk orang dewasa (dititipkan pada LP orang dewasa).

Dari keseluruhan paparan di atas, dapat dicatat bahwa anak-anak pelaku delinkuen di lokasi penelitian adalah pelajar, sebagian besar

pelaku tindak pidana terhadap harta benda, sebagian besar dijatuhi sanksi pidana penjara (1-6 bulan), pembinaan terhadap mereka dilakukan bukan di tempat pembinaan khusus anak melainkan di tempat pembinaan untuk orang dewasa.

Pada sisi lain, hasil wawancara dengan anak-anak klien BAPAS sebagian besar anak-anak menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan proses pemidanaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka – stigmatisasi. Penanganan petugas yang demikian itu terjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Penelusuran informasi di kalangan para petugas hukum menunjukkan bahwa tampaknya persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak. Legitimasi mereka sebagai

penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa khusus Anak, Hakim khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak.¹³

Hadirin yang saya hormati,

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pembinaan. Kesemuanya menunjukkan indikator yang berupa stigmatisasi anak, dan sudah barang tentu hal ini akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang. Kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi akan membekas pada diri anak (terjadi "*selfprophecy process*") dan sangat potensial sebagai faktor kriminogen – anak akan mengulangi perbuatan kenakalannya lagi di masyarakat.

Apa yang kemudian dapat dicatat dari seluruh paparan di atas, ialah bahwa meskipun UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara normatif sedikit banyak telah memberikan rambu-rambu penanganan anak pelaku delinkuen, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terwujud. Sebaliknya penanganan anak justru cenderung membekaskan stigma pada diri anak dan pada gilirannya akan menjadi faktor pendorong bagi anak-anak itu untuk mengulangi perbuatannya lagi di masyarakat di masa datang.

Klep pengaman yang sebetulnya sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus anak pelaku delinkuen ini ialah "diversi" – penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional, berupa pelayanan sosial, perbaikan kerugian korban dan sebagainya, tidak diakomodasi oleh UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga tidak mengherankan bila begitu anak-anak pelaku delinkuen "terperangkap" dalam mesin peradilan pidana anak, otomatis menjadi klien mesin peradilan pidana anak, dan konsekuensi ialah stigmatisasi.

Hal lain yang rasanya perlu dikemukakan, ialah bahwa dasar hukum penanganan anak

delinkuen di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai ketentuan Hukum Umum (*Lex generalis*) dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (*lex specialis*), secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang “sakit” dan perlu “diobati” dengan cara “mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya, sehingga seorang anak melakukan perbuatan penyimpangan (delinkuensi). Berbekal “hasil diagnosis” itu disusunlah “terapi” untuk mengobati “sakit” si anak, berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) erat kaitannya dengan masalah ini ialah model pemidanaan yang disebut “individualisasi pemidanaan” (*Individualization of sentencing*).

Hadirin yang saya hormat,

Seperti sudah disinggung di muka, model “pembinaan pelaku secara perorangan”

(*Individual Treatment Model*) sebagai model peradilan anak dalam perkembangan dunia akademis (kriminologis) sudah dianggap ketinggalan zaman, lembaga-lembaga hukum subsistem Peradilan Pidana Anak dianggap sebagai agen kesejahteraan sosial (*quasi social welfare institutions*) pengelolaannya membutuhkan perencanaan managerial yang kompleks, professional, biaya mahal, dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya menjadikan anak pelaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Apabila demikian halnya, lalu langkah penanggulangan gejala perilaku delinkuensi anak apakah yang harus diupayakan untuk masa mendatang, haruskah model penanganan anak delinkuen yang berlandaskan model *individual treatment* dilanjutkan ataukah ada model penanganan anak lain yang lebih menjanjikan terhindarnya anak dari proses stigmatisasi mesin peradilan pidana anak ? Pertanyaan itu mendorong orang untuk melakukan penelusuran model peradilan anak yang kini mulai dilirik di kalangan para pemerhati penanganan anak bermasalah (hukum) di sebagian besar belahan bumi ini.

Hadirin yang saya hormati,

PERADILAN

ANAK

RESTORATIF :

SUATU MODEL

ALTERNATIF

Model adalah suatu lensa pandang esensial terhadap masalah dan suatu kerangka berpikir ke arah pemecahan masalah. Seperti lensa pandang lainnya, model memfokuskan visi seorang ilmuwan secara khusus, membatasi atau menyaring cara pandang alternatif lain. Model mempertajam pemahaman ilmuwan atas suatu realitas dan menentukan cara pemecahan masalahnya. Model mempertajam apa yang ingin diketahui oleh ilmuwan menjadi sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin dikaji menurut akal sehat. Model menyediakan juga perangkat prioritas dan memberikan tema-tema umum bagi sistem peradilan. ¹⁴

Kajian

Kriminologi

Dalam kajian kriminologis dikenal adanya tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*); (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan (c) model restoratif (*restorative model*). Masing-masing menunjukkan karakteristiknya sendiri-sendiri.

Lebih dari satu dekade model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan model retributif (*retributive model*) telah

memberikan perangkat prioritas campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Di dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai satu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya. Model pembinaan pelaku perorangan, di negara-negara Eropa dikenal sebagai "Model Kesejahteraan Anak", berangkat dari satu cara pandang bahwa kejahatan atau delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau dihadapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat pemberian

sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku delinkuen.

15

Kritik dilontarkan terhadap model pembinaan pelaku perorangan ini terutama terarah pada stigmatisasi, paternalistik, mahal, tak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Di samping itu, model ini dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi atau untuk memberikan akibat penuh makna terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal untuk menunjukkan keunikan peran dari peradilan anak dalam kerangka penyelamatan publik. Keputusan bersifat ambivalen dan tak taatazas (*inconsistent*) serta cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik

Bersamaan dengan pudarnya asas *parens patriae* di tahun 1970 an, kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan makin hebat, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Arah reformasi tertuju pada pengaplikasian filosofis "pemberian ganjaran" (*just desert philosophy*). Aplikasi

filosofis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalkan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian pidana yang pasti, kitab undang-undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku, memperluas kekuasaan prosekutorial. Di samping itu, pengaplikasian model tersebut melahirkan sejumlah kritik yang berkenaan dengan (a) pemberian legitimasi baru pada pidana yang menjadi kepentingannya, kebijakan retributif memberikan sinyal pada penuntut umum dan pembuat keputusan lainnya, bahwa itulah jalan terbaik dan tepat untuk memberikan reaksi pada perilaku delinkuensi anak; (b) penempatan secara setingkat sanksi punitif dengan pemberian penderitaan bagi pelaku, legitimasi penghukuman retributif melahirkan semacam pembenaran penjatuhan pidana yang lebih berat lagi apabila ternyata bahwa tingkatan pidana yang ada tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. ¹⁶

Kondisi memudahkan model pembinaan pelaku perorangan dan meningkatnya tuntutan model retributif sedikit banyak cukup merepotkan kaum professional peradilan anak. Pidana mungkin dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, tetapi ia dapat pula bersifat "*counter deterrent*". Pidana menimbulkan permasalahan akan pembenaran dorongan delinkuensi lebih lanjut melalui penggerogotan pengendalian diri, stigmatisasi pelaku anak, memperlemah ikatan konvensional masyarakat lewat prospek pemberian pekerjaan dan hubungan kekeluargaan serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group*. Sementara pada sisi lain, pembinaan pelaku sering mensyaratkan pelaku untuk berperanserta pada pelayanan konseling atau pengobatan, pada dasarnya fokusnya lebih terarah pada diri pelaku seorang dan tidak tercermin adanya maksud pembinaan rasa tanggungjawab pelaku atas dampak perbuatannya yang menimpa korban atau masyarakat.¹⁷

Kegelisahan kaum professional peradilan anak pada satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi reparatif (alternatif)

dan proses penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi pelaku dan korban pada sisi lain, memunculkan pemikiran reformatif peradilan anak ke arah model restoratif. Ciri pembeda model restoratif dengan model-model sebelumnya terletak pada caranya memandang perilaku delinkuensi anak. Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan restoratif tidak bersifat punitif juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Ia juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperanserta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperanserta di dalam proses. **Braithwaite** (1989) mengungkapkan

cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.¹⁸

Hadirin yang saya hormat,

lus

Constituendum

Peradilan Anak

Restoratif

Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuesi anak tak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.¹⁹

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian pelaku delinkuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif) melainkan berdimensi jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak punitif tidak membekaskan stigma, tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga

dan *peergroup* nya, cukup menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen di Indonesia masa datang.

Untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan akomodasi paradigma peradilan anak restoratif dalam peradilan pidana anak, di bawah ini dikemukakan praktik peradilan anak di Negeri Belanda. Pilihan peradilan anak Negeri Belanda sebagai perbandingan, didasarkan atas pengalaman pribadi penyaji melakukan pengamatan secara langsung praktik penanganan anak delinkuen baik lewat pengadilan maupun lewat cara-cara alternatif yang sungguh-sungguh mencerminkan model peradilan anak restoratif di negeri itu.

Hadirin yang saya hormati,

Di dalam hukum pidana anak Belanda, ditentukan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan bagi anak-anak dengan tingkat usia tertentu. Stelsel sanksi bagi anak berupa pidana dan tindakan. Karakteristik hukum pidana anak Belanda terletak²⁰ pada azas yang melandasi penyelenggaraan peradilan pidana berupa azas pedagogik. Sanksi bagi anak di dalamnya harus

**Peradilan Anak
Restoratif
Negeri Belanda**

20

terkandung unsur pedagogik. Metode penanganan alternatif dalam fase penyidikan dan fase-fase berikutnya (termasuk sanksi alternatif) diberikan legitimasi secara mendasar dalam hukum pidana anak yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht* – disingkat Sr).

Peraturan perundang-undangan pidana anak terdapat dalam Bab VII A, “Ketentuan Khusus untuk Anak” Buku I *Wetboek van Strafrecht*– Sr. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 77a s/d 77gg Sr. Tanpa mengurangi arti penting dari pasal-pasal tersebut di atas, sajian berikut akan lebih difokuskan pada karakteristik hukum pidana anak Belanda yang mencerminkan sifat-sifat model peradilan anak restoratif. Seperti telah disinggung di muka, bahwa sifat pedagogik sangat menonjol dan menjadi ciri hukum pidana anak Belanda. Sifat pedagogik ini dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan pasalnya, terutama ketentuan yang mengatur tentang diversifikasi dalam bentuk transaksi oleh polisi dengan anak pelaku tindak pidana. Transaksi polisi dengan anak ini terwujud dalam bentuk kerja sama dengan biro HALT (*Het Alternatief*).

**Transaksi oleh
Polisi**

Transaksi oleh polisi dengan anak terkandung di dalam Pasal 74c ayat (1) Sr. berikut ini.

Pasal 74c ayat (1) Sr :

Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen opsporingsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen zaken betreffende overtredingen begaan door personen die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, tot wederopzeggens de bevoegheid worden verleend die bij artikel 74 eerste lid aan de officier van justitie is toegekend.

(Berdasarkan atas peraturan pemerintah dapat kepada pejabat penyidik seperti ditunjuk oleh peraturan pemerintah itu untuk tindak pidana tertentu yang diperbuat oleh seseorang yang belum mencapai umur 12 tahun berdasarkan Pasal 74 ayat 1 dapat merumuskan kebijakan tertentu sebagai kepanjangan kewenangan dari Penuntut Umum)

Itu berarti bahwa menurut pasal tersebut, pejabat penyidik dapat membuat kebijakan tertentu sebagai wujud kepanjangan kewenangan Penuntut Umum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu yang umurnya di bawah 12 tahun. Kebijakan itu dimaksudkan, polisi dapat merumuskan satu persyaratan atas

diri terdakwa anak lewat persyaratan itu penuntutan pidana dapat dicegah. Kewenangan polisi ini merupakan kepanjangan kewenangan untuk melakukan transaksi dari penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Sr, berikut ini.

1. De officier van Justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolgung wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering. (Penuntut Umum sebelum persidangan dapat menyusun satu atau lebih persyaratan untuk mencegah adanya penuntutan pidana atas tindak pidana tertentu, - selain tindak pidana berat yang diancam pidana penjara oleh ketentuan yang berlaku tidak lebih dari 6 tahun tindak pidana ringan, Hak penuntutan pidana Penuntut Umum gugur bila persyaratan itu dipenuhi).

Dalam praktik polisi mengembangkan kebijakan proses verbal dalam penanganan tindak pidana anak. Dalam sejumlah kasus, penyusunan proses verbal dibelokan (diversi) atau dicukupkan dengan proses verbal singkat atau laporan sumir. Itu semua dikaitkan dengan sifat tindak pidana yang

diperbuat dan umur pelaku serta rekam kejahatan (*criminal record*) si pelaku. Untuk pelaku pemula dan tidak untuk semua jenis tindak pidana dilakukan penanganan di luar jalur yustisial konvensional. Di dalam kejadian ini anak pelaku diarahkan langsung pada program-program pemberian pertolongan pada anak atau ditangani lewat pembicaraan antara polisi dengan anak pelaku, orang tua pelaku, korban, keluarga korban, atau mungkin dirasakan cukup kepada anak diberikan "sanksi" tegoran keras dan pembayaran ganti kerugian pada korban. Keseluruhan langkah penanganan polisi itu tanpa diikuti pengiriman proses verbal ke Penuntut Umum. Di tingkat permulaan penyelesaian dari kepolisian ini muncul beranekaragam proyek kerjasama antara instansi yang terarah pada upaya pemberian pertolongan anak yang sifatnya mendidik anak pelaku delinkuen. Salah satu yang hingga kini terkenal adalah kerja sama kepolisian dengan Biro HALT.

Hadirin yang saya hormati,

2. Biro HALT

Pada tahun 1981 di Rotterdam didirikan Biro HALT (*Het Alternatief*), biro ini didirikan pertama

kali untuk menanggulangi vandalisme di kalangan anak-anak. Anak yang mengakui kesalahan dan merasa menyesal dapat memilih antara penanganan secara konvensional oleh polisi atau berperan serta dalam proyek HALT.

Keperansertaan anak dalam proyek HALT dilakukan lewat pembuatan perjanjian antara anak pelaku vandalisme dengan petugas Biro HALT, mengikuti program HALT selama waktu luang anak atau membayar ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Bersamaan dengan itu pula, di dalam Biro ini dibicarakan masalah yang menyangkut latar belakang problematik anak dan pemikiran-pemikiran anak tentang bagaimana secara bersama-sama menciptakan ketertiban masyarakat. Cara penanganan ini di Amerika Serikat termasuk "diversi" penanganan anak, tampaknya cukup berhasil. Di dalam perkembangannya di hampir seluruh wilayah di Negeri Belanda didirikan Biro HALT. Pola kerja Biro HALT pun dalam perkembangannya diperluas, tidak hanya menangani kasus-kasus vandalisme melainkan juga bentuk-bentuk lain dari kejahatan ringan yang pelakunya anak-anak.

Perkembangan terakhir, pembuat undang-undang memberikan legitimasi penyelesaian secara alternatif dalam fase penyelidikan melalui Biro HALT. Kebijakan penyelesaian secara alternatif (oleh Biro HALT) tidak dilihat sebagai bentuk pengenaan sanksi, melainkan sebagai suatu usulan polisi kepada anak pelaku delinkuen untuk melakukan transaksi dalam bentuk pembayaran sebagai jaminan atau pembayaran ganti rugi dan sebagainya.

Pasal 77e ayat (1) Sr.

1. De opsporingsambtenaar die daartoe door de officier van justitie is aan gewezen, kan na verkregen toestemming door de officier van justitie aan de verdachte voorstellen dat deze deelneemt aan een project. De deelneming strekt tot voorkoming van toezending van het opgemaakte process-verbaal aan de officier van justitie. (Pejabat penyidik yang ditunjuk oleh kewenangan penuntut umum dapat, setelah memperoleh ijin dari penuntut umum, mengusulkan pada terdakwa anak untuk mengikuti suatu proyek. Tujuan dari keperansertaan itu untuk mencegah polisi mengirimkan proses verbalnya kepada penuntut umum).

Pasal di atas memberikan kewenangan

pada pejabat penyelidik yang ditunjuk oleh penuntut umum untuk mengusulkan keperansertaan terdakwa anak dalam suatu proyek untuk mencegah pengiriman prosesverbal polisi kepada penuntut umum. Usulan keperansertaan kepada terdakwa oleh polisi itu harus dituangkan secara tertulis (Pasal 77e ayat (2) *,Het voor- stel, mededeling en de inlichtingen over de mogelijke gevolgen worden daarbij de verdachte tevens schriftelijke ter handgesteld*). Arah usulan itu terfokus pada kebijakan penyelesaian tindak pidana anak yang ada kesesuaiannya dengan tindak pidana yang dapat ditangani lewat transaksi dengan polisi. Prosesverbal dapat dibuat oleh polisi, namun bila ternyata terdakwa anak menerima usulan transaksi pihak penyelidik, maka prosesverbal itu tidak lagi diteruskan kepada penuntut umum. Ini berarti sangat dibutuhkan adanya pejabat penyelidik khusus yang faham dan mempunyai ketertarikan pada anak.

Contoh kegiatan Biro HALT dalam melaksanakan transaksi polisi dapat dikemukakan berikut ini.

Penanganan Kasus Pencurian seorang Anak di Mall.

Kasusnya menyangkut seorang anak yang bernama B mencuri barang di Mall. Perbuatan B diketahui Petugas Keamanan Mall bersangkutan, dan di tangkap, dan diserahkan pada polisi. Atas dasar pemahaman polisi, perbuatan B memenuhi syarat untuk diikutsertakan program HALT. Transaksi yang ditawarkan oleh polisi diterima oleh B dan orang tuanya. Petugas HALT kemudian memanggil B beserta orang tuanya, pemilik Mall (korban) dan polisi. Perjanjian yang dihadiri oleh pihak-pihak itu kemudian secara bersama-sama melakukan "perundingan" untuk menentukan "sanksi" yang harus dijatuhkan pada si B. Kesepakatan yang terjadi antara anak pelaku, orang tua anak, korban (pemilik Mall), petugas HALT dan polisi. B harus mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemilik Mall dan untuk menebus kesalahannya si B harus membersihkan lantai Mall selama 2 bulan, yang pengerjaannya dilakukan tiap akhir minggu selama 2 jam, yang waktunya bebas ditentukan sendiri oleh B, sesuai dengan waktu luangnya. Pada akhirnya B dilaporkan telah menyelesaikan "tugas" nya dengan baik dan tidak ada lagi penuntutan pidana atas diri B.

Hadirin yang saya hormati,

Hal yang menarik dari kasus di atas,

penanganan biro HALT dan polisi itu adalah bahwa (a) telah terjadi penyelesaian kasus-kasus delinkuensi anak di luar jalur yustisial konvensional; ((b) telah terjadi penyelesaian kasus-kasus delinkuensi anak yang betul-betul mencerminkan “penyelesaian konflik” lewat “kesepakatan” antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan petugas (Polisi dan Petugas HALT); (c) “sanksi” atas diri anak diputuskan atas dasar hasil kesepakatan semua pihak yang disaksikan oleh petugas (polisi dan HALT); (d) korban dalam proses ini diberikan peran aktif secara bersama-sama menentukan “sanksi” yang harus diterimakan pada anak pelaku delinkuen.

Apa yang tampak dari praktek penyelenggaraan transaksi polisi yang bekerjasama dengan Biro HALT menunjukkan adanya pola penyelesaian konflik kasus delinkuensi anak yang melibatkan berbagai pihak sekaligus, - pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, petugas hukum dan petugas Biro HALT (pakar bidang ilmu tertentu) serta masyarakat. Dampak yang timbul dari pola penyelesaian kasus-kasus yang demikian itu ternyata dirasakan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya sebagai sangat

baik. Pelaku delinkuen “dipaksa” untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan keluarganya, mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan korban dan keluarganya, sering pula dihadiri teman-teman (*peer-group*) si pelaku. Keluarga pelaku “dipaksa” untuk mengetahui perilaku anggota keluarganya yang berperilaku tak baik itu, dan “dipaksa” untuk ikut mempertanggungjawabkan perbuatan si pelaku pula (lalu bersifat struktural internal keluarga pelaku). Korban dan keluarganya pun merasakan sebagai sesuatu pola penyelesaian yang baik, karena mereka di ikutsertakan untuk “menghakimi” perbuatan pelaku, dan ikut menentukan jenis “sanksi” yang sepantasnya dijatuhkan pada pelaku. Pada akhirnya hubungan yang tadinya “tegang” antara korban, keluarganya dengan pelaku dan keluarganya, pun lalu memudar dan cair, dan yang muncul adalah hubungan harmonis dilandasi rasa kasih sayang di antara mereka. Petugas Biro HALT hanya memfasilitasi keberlangsungan proses penyelesaian konflik tersebut, sementara petugas kepolisian hanya menjadi saksi, dan setelah itu petugas kepolisian melaporkan hasil

penyelesaian itu kepada penuntut umum, bersamaan dengan itu, gugur pula hak penuntutan pidana penuntut umum atas si pelaku delinkuen, dan dengan demikian terhindarlah anak pelaku delinkuen dari stigma atau pelabelan pribadinya sebagai pelaku delinkuen.

Apa yang tampak kemudian dari pola penyelesaian kasus-kasus yang demikian itu, ialah bahwa di dalam penyelesaian kasus-kasus pidana anak itu terkandung adanya apa yang dinamakan *family-group conference*, pola penyelesaian antar keluarga melibatkan tiga pihak sekaligus, difasilitasi petugas HALT dan disaksikan polisi dan rekam jejak kejahatan (*criminal track record*) anak pun tak ada, stigmatisasi anak pun lalu dapat dicegah. Gambaran pola penyelesaian yang demikian itu bila kemudian dikaitkan dengan indikator-indikator atau parameter-parameter model peradilan anak, maka model penyelesaian ini merupakan cerminan dari penyelesaian kasus pidana anak ***restorative juvenile justice model***.

Berdasarkan hasil penelusuran bahan-bahan pustaka dan jurnal-jurnal kriminologi, tampak bahwa model penyelesaian kasus-kasus

pidana anak yang berasaskan model peradilan anak restoratif sudah dipraktekkan di berbagai negara, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Utara dan Jepang. Perkembangan terakhir model peradilan restoratif ini telah diakomodasi oleh PBB dalam ***UN Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.***

Memperhatikan (a) praktik penyelesaian kasus-kasus pidana anak di Indonesia yang masih tinggi kecenderungannya meninggalkan stigma pada diri anak; (b) hasil penyelesaian kasus pidana model peradilan anak restoratif yang cenderung positif (baik bagi pelaku, korban dan masyarakat) dan (c) praktek-praktek penerapan pola penyelesaian kasus-kasus anak di beberapa negara yang menunjukkan kecenderungan model peradilan anak restoratif dan (d) besarnya perhatian PBB akan pola penyelesaian restoratif yang kemudian tertuang dalam *UN Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, maka cukup beralasan bila di Indonesia dikembangkan model-model penyelesaian kasus-kasus pidana anak kearah

**Implikasi Model
Peradilan Anak
Restoratif di
Indonesia**

model peradilan anak restoratif di masa datang.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal implikasi model peradilan anak restoratif di Indonesia, adalah (a) reformasi sistem perundang-undangan (substentif dan prosedural) penyelenggaraan pengadilan anak dengan cara mengadopsi prinsip-prinsip peradilan anak restoratif; (b) mempertimbangkan potensi yang dimiliki BAPAS, BAPAS perlu diberdayakan bukan saja sebagai lembaga yang memberikan laporan sosial anak pelaku delinkuen dalam sistem peradilan pidana anak melainkan, sebagai lembaga penyelenggara berlangsungnya rekonsiliasi dalam bentuk *familygroup conference* yang mempertemukan anak pelaku beserta keluarganya, teman-teman *peer-group* nya, korban dan keluarganya, masyarakat yang difasilitasi oleh Petugas BAPAS sehingga terwujud cara-cara alternatif penanganan anak delinkuen seperti yang terkandung dalam model peradilan anak restoratif.

Simpulan

Hadirin yang saya hormati,

Sampailah kini pembicaraan saya pada pokok-

pokok pikiran yang secara keseluruhan terkandung dalam pidato ini. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai wujud konkrit penanganan kasus pidana anak di masyarakat cenderung membekaskan stigma pada diri anak. Stigmatisasi anak sangat merugikan masa depan perkembangan jiwa anak dan menjadi faktor kriminogen terjadinya delinkuensi anak.
2. Kecenderungan itu terjadi karena UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (1) secara substantif cacat hukum. Ketentuan formulatif yang memungkinkan pelaku anak ditangani secara alternatif (ketentuan tentang diversi) tidak ada; (2) secara prosedural tidak didukung (a) profesionalisme penegak hukum yang membidangi anak; (b) keterbatasan prasarana dan sarana tempat penahanan dan pembinaan khusus bagi anak (anak binaan ditempatkan bersama-sama dengan penjahat dewasa).
3. Penyelenggaraan peradilan pidana anak berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dalam praktek masih didominasi pendekatan terapeutik, satu pendekatan yang dijiwai model peradilan pembinaan anak secara perorangan (*Individual Treatment Model*). Penyelesaian kasus-kasus pidana anak dengan model ini tanpa didukung lembaga-lembaga yang memadai cenderung kurang efektif dalam menanggulangi terjadinya perilaku delinkuensi anak di masyarakat.

4. Di dalam perkembangan kajian akademis kriminologik dijumpai satu model peradilan anak yang lebih menjanjikan penyelesaian konflik (*conflikt opplossing*) nirstigma dan berdimensi jamak, pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, teman-teman (*peergroup*) pelaku petugas kemasyarakatan, petugas hukum dan masyarakat secara luas. Model peradilan anak restoratif telah dipraktek di berbagai negara, karena sifatnya yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak pelaku delinkuen pada khu-susnya dan perlindungan hak-hak anak pada umumnya.
5. Konsep *restorative justice* dewasa ini telah

memperoleh perhatian PBB, bahkan PBB telah menganjurkan perlunya didayagunakannya konsep tersebut secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui *UN Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

6. Atas dasar itu, maka sudah saatnya model peradilan anak restoratif dipertimbangkan sebagai asas peradilan anak di Indonesia. Model ini ada kesesuaiannya dengan model penyelesaian konflik terpadu (integral) yang terkandung dalam nilai-nilai filsafati bangsa ini Pancasila, hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, dan kecenderungan internasional (deklarasi PBB).
7. Implikasi model peradilan anak restoratif di Indonesia dilakukan dengan cara mereformasi sistem perundang-undangan (substantif dan prosedur) tentang pengadilan anak dengan mengakomodasi prinsip-prinsip model peradilan anak restoratif dan memberdayakan BAPAS sebagai salah satu lembaga penyelenggara model peradilan anak restoratif.

Harapan dan
Pesannya kepada
Mahasiswa

Demikian pokok-pokok pemikiran saya tentang peradilan anak restoratif alternatif model peradilan anak di Indonesia masa datang: Saya yakin masih banyak yang harus dikemukakan. Hal inilah yang nantinya akan saya kembangkan dalam karir saya di masa mendatang.

Para mahasiswa yang saya cintai, pengalaman saya menjadi dosen selama hampir 30 tahun, menyadarkan saya bahwa ternyata pendidikan di fakultas hukum hanya memberikan kematangan intelektual. Untuk menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat yang berubah dengan cepat dan bersifat global, saya minta saudara-saudara sekalian lebih mematangkan kepribadian saudara, sebagai pendukung kematangan intelektual saudara, Mudah-mudahan saudara sekalian nantinya mampu menjadi insan hukum yang *"punjul ing apapag"*, *"menjila"* (baik dari segi kualitas keilmuan, penguasaan bahasa asing, maupun dari segi kejiwaan dan moralitas) serta selalu *"manjing ajur-ajer"* berlandaskan *"cinta kasih"* dalam berkarier dan bermasyarakat. Sehingga saudara dapat menjadi suri tauladan dan *"menjadi berkat"* di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat saudara.

**Harapan dan
Pesan kepada
Dosen Muda**

Konsekuensi memilih profesi sebagai dosen ilmu hukum adalah belajar dan selalu belajar untuk menuju jenjang keilmuan yang lebih tinggi, lewat pendidikan strata 2 dan strata 3. Oleh karena itu perlu adanya pembulatan tekad bagi anda sekalian untuk mencapai tujuan itu. *No One is to old to learn*. Harapan saya semoga anda sekalian dapat menjadi Insan Hukum yang memiliki sifat *homo ethicus* (manusia susila); *homo politicus* (manusia yang cakap dalam memahami dinamika hukum, mampu menyesuaikan pemikiran hukum dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan hidup bersama) dan *homo juridicus* (manusia cakap dalam teknis hukum). *De geode jurist is meer dan aleen jurist*.

Perkenankanlah saya sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih, yang telah mengijinkan untuk menyandang gelar Guru Besar yang penuh kehormatan ini.

**Ucapan Terima
Kasih**

Rasa terimakasih yang tak terhingga ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah berkenan mengangkat saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Kriminologi.

Kepada Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, baik selaku Rektor Universitas Diponegoro dan Ketua Senat maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan terimakasih atas segala dorongan, bimbingan dan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar.

Kepada seluruh Guru Besar di lingkungan Universitas Diponegoro, para dosen dan staf akademis dan administrasi, para alumni serta para mahasiswa, saya ucapkan terima kasih secara khusus atas segala pengertian dan penciptaan suasana kerja yang kondusif yang mendorong saya untuk maju.

Ucapan terimakasih yang tidak terlukiskan besarnya sangat khusus saya haturkan kepada Prof. Sudarto, SH (almarhum), Mas Han Bing Hoo, SH (almarhum), yang dengan sabar dan berkelanjutan memberikan bimbingan kepada saya pada saat-saat saya baru pertama kali masuk sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. Muladi, SH promotor saya dan Prof. Dr. Romli Atmasasmitas, SH, LLM co-promotor saya sewaktu mengambil gelar

Doktor di Universitas Diponegoro, yang dengan caranya yang khas selalu memberikan petuah-petuah berharga demi kemajuan saya.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih pula kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH yang dengan sabar dan penuh kearifan selalu membangun semangat saya untuk maju dan terus maju baik pada masa-masa permulaan saya masuk fakultas hukum hingga sekarang ini. Demikian juga kepada Uda Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, yang secara berkelanjutan selalu mendampingi dan memotivasi saya dalam proses penyusunan disertasi, hingga pencapaian gelar Guru Besar saat ini. Demikian juga halnya kepada kamas saya, Prof. Dr. I.S. Susanto, SH (almarhum) selaku kakak seperguruan di bidang kriminologi, yang dengan pendekatannya yang khas mampu memberikan dorongan sehingga saya sampai pada status akademik sekarang ini.

Kepada para Guru Besar Kriminologi yang saya hormati, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, Prof. B. Mardjono Reksodiputro, SH, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH. MA, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sehingga saya terpacu untuk maju.

Secara khusus ingin pula saya sampaikan ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Grat van den Heuvel; Prof. Nico Keizer; kamas Prof. Dr. Han Bing Siong, SH; Prof. Dr. Josine Junger Tass; Ibu Marianne Thermorshuizen, Bapak Paul Moedigdo, SH, dari Negeri Belanda yang telah banyak sekali memberikan inspirasi dan dorongan untuk bekerja keras.

Kepada Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH sebagai Ketua Peer Group, Prof. Dr. dr. H. Soebowo, DSPA,; selaku Sekretaris *Peer Group*, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH; Prof. H. Abdullah Kelib, SH, Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahaju, SH, MS; Prof. Dr. Ir. Lachmudin Sya' rani, Prof. Drs. Sudjarwo, dan Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.PD. sebagai anggota *Peer Group*, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada guru-guru saya di Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas serta dosen-dosen saya semasa saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada Almarhum Ayah dan almarhumah

ibu saya, yang saya hormati dan saya cintai, saya haturkan sembah bekti disertai permohonan maaf yang tak terhingga dan terima kasih yang tiada terkira atas keprihatinan dan doa restu yang telah saya nikmati pada masa-masa silam. Demikian juga kepada Almarhum ayah mertua saya, juga ibu mertua saya, matur nuwun atas segala perhatian dan doa restunya.

Demikian pula halnya kepada kakak-kakak saya dan adik saya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan nasihat-nasihatnya selama ini kepada saya sekeluarga.

Pada akhirnya kepada isteriku tercinta (E. Budi Nastiti), kepada anak-anakku (Siwi dan Seta). Kiranya sangat sulit untuk menyatakan betapa besar terimakasihku kepada kalian semua. Keprihatinan, pengertian, dinamika dan romantika keluarga kita, semuanya itu merupakan daya yang membakar semangatku untuk mengantarkan kita semua ke kehidupan yang terpuji. Semoga anak-anakku dapat meneladani hal-hal yang baik ini.

**Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita
semua.**
Amin.....
Wassalam mualaikum wr. wb.

SUMBER KUTIPAN DAN CATATAN

1. Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana, Bandung :** Alumni, 1977, hal. 16.
2. Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung :** PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 49
3. Barda Nawawi Arief ., *ibid*, hal. 8
4. Gordon Bazemore, *"Three Paradigms of Juvenile Justice"* dalam Burt Gallaway & Joe Hudson (ed.) ***Restorative Justice : International Perspectives***, Amsterdam : Kluger Publications, 1996, p. 40, 41.
5. Romli Atmasasmita, **Azas-azas Perbandingan Hukum Pidana, Bandung :** CV. Mandar Maju, 1989, hal. 19
6. Soerjono Soekanto, **Perbandingan Hukum, Bandung :** Alumni, 1979, hal. 5
7. Romli Atmasasmita, op.cit, hal. 32
8. DPR-RI, **Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang ten-tang Peradilan Anak, Jakarta :** DPR-RI, 1996, hal. 5
9. Lembaran Negara RI tahun 1997 No. 3, - **Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta ;** Sekretariat Kabinet, . 1997
10. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29*

November 1983, **A Compilation of International Instruments**, Volume I (First Part) Universal Instruments, New York : United Nations, 1993, p. 362.

11. Margo, F, Andriesen, **Buitenjustitiële aanpak van jeudige delinkwenten**, Arnhem : Gouda Quint, bv, 1995, p. 24.
12. Periksa temuan penelitian Paulus Hadisuprpto, tentang “Ikatan Sosi al dan Perilaku Delinkuensi Anak di Jawa Tengah, tahun 1995 – 2000, Lemlit Undip, Periksa juga Paulus Hadisuprpto, **Juvenile Delinquency** (Pemahaman dan Penanggulangannya), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 93, Periksa juga temuan penelitian Paulus Hadisu prpto tentang Pemberian Malu Reintegratif dan Delinkuensi Anak di Jawa Tengah, Penelitian Mandiri untuk disertasi, tahun 2001-2002, pe riksa juga disertasi Paulus Hadisuprpto, berjudul “Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak” (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Undip : 2003.
13. Zehr, H, **Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice**, Scotdale : PA. Harold Press, 1990, p. 87
14. Walgrave, L. “*Beyond Retribution and Rehabilitation : Restoration as the Dominant Paradigm in Judicial Intervention against Juvenile Crime*”, dalam Burt Gallaway & Joe Hudson, **Restorative Justice : International Perspectives**, Amsterdam : Kluger Publication, 1993, p. 3.

15. Gordon Bazemore, *op.cit.*, p. 59
16. Gordon Bazemore, *ibid.*, p. 61
17. Consedine, Jim, ***Restorative Justice, Healing the Effects of Crime***, Christ Church : Ploughshares Publications, 1996, p. 99.
18. Consedine, Jim, *ibid.*, p. 100.
19. Penelusuran bahan pustaka di bidang peradilan anak, restoratif menunjukan bahwa model paradigma peradilan anak ini telah dilakukan di berbagai negara. Kanada, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, Jepang dan Negeri Belanda. Paparan ini mengetengahkan peradilan anak restoratif Negeri Belanda, karena saya secara pribadi telah melakukan penelitian secara intens praktek peradilan anak model restoratif ini selama 3 bulan di Negeri Belanda. Lihat juga Fruin, J.A. ***Nederlandse Wetboeken***, Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink : 1996, p. 1200-1208.

DAFTAR PUSTAKA

Agleton, Peter, **Deviance**, London : Tavistock Publications, Ltd, 1987

Allen, A. Franciss, **The Borderland of Criminal Justice**, Chicago : The University of Chicago Press, 1964
Alma van Hees, "Halt : Early Prevention and Repression, recent Development and Research" Paper for the XII th International Workshop on Research into Juvenile Criminology, Early Detection, Prevention and Intervention, Noordwijkhout, 18–20 June 1997

, "Opgepakt door de Politie", Amsterdam : Bureau Halt Nederland, 1999

Andriessen, F, Margo, **Buitenjustitie aanpak van jeudige delinkwenten**, Arnhem : Gouda Quint, bv. 1995.

Asquith Stewart & Mallcom Hill (eds.) **Justice for Children**, Doordrecht : Martinus Nijhof Publisher, 1994

Atmasasmita, Romli, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989

Bartel, j.e.c, **Jeugdstrafrecht**, het nieuwestrafrecht, Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1995

Bazemore, Gordon, "Three Paradigms of Juvenile Justice", Burt Gallaway & Joe Hudson (ed.) **Restorative Justice : Intermediational Perspectives**, Amsterdam : Kluger Publications, 1996

Becker, S. Howard, **Outsiders**, Studies in Sociology, New York : The Free Press of Glencoe, 1963

Berlyn, Epstein & Sam, **Kid in the Court**, the ACLU defends their Rights, New York : Four Winds Press, 1985

Bong-Ho, Mok, "Young Offenders in Contemporary China : Contributing Factors and Related Services", **Centre for Contemporary Asian Studies**, Ocasional Papers, General Series, No. 1 Hongkong : Institute of Social Studies, The Chinese University of Hongkong, Dec. 1985

_____, "Problem Behavior on Adolescent in Hongkong" a sociological perspective, **Centre for Hongkong Studies**, Ocasional Papers No. 7, Hongkong : Institute of Social Studies, The Chinese University of Hongkong, March, 1985

Braithwaite, John, **Crime Shame and Integration**, Cambrigde : University Press, 1989

_____, "Thinking Harder about Democratizing Social Control " in **Family Conference and Juvenile Justice, the way forward of misplaced optimism**, Canberra : Australian Institute of Criminology, 1994

_____, "Reintegrative Shaming of Criminal Offender" Paper to National Conference on Crime, Shame and Reintegration in Indonesia, Semarang, 1996

_____, "Restorative Justice : Assesing optimistic and pessimistic accounts" in M. Tonry (ed.) **Crime and Justice**, a review of Research, Chicago : University of Chicago Press, 1999

_____, "Survey Article : Repentance Rituals and Restorative Justice" in **Journal of Political Philosophy**, vol, 8, No. 1 March, 2000, Oxford : Blackwell Publ. 2000

_____, "Shame and Criminal Justice" in **Canadian Journal of Criminology**, July, 2000

_____, "Restorative Justice and Social Justice" in **Saskatchewan Law Review**, Saskatchewan : University of Saskatchewan : College of Law, Vol. 63, (1) 2000

Cavadino, Michael & James Dignan, **The Penal System**, third edition, London : Sage Publication Ltd, 2003

Consedine, Jim, **Restorative Justice, Healing the Effect of Crime**, Christ Church : Ploughshares Publications, 1995

- Crain, C. William, **Theories of Development**, Concepts and Applications, Englewood Cliffs : Prentice Hall Inc. 1996.
- Cremers, A.J.P.H, & Weerkamp-Beens, J.A, **Nederlandse Wetboeken**, Zwolle : Tjeenk Willink, W. E. J, 1996
- Faust, L, Frederick & Paul J. Brantingham, **Juvenile Justice Philosophy**, Reading, Cases and Comments, (2nd editions), St Paul Minne sota : West Publishing, Co, 1979
- Filler, Ewald (eds.) **Children in Trouble**, UN Expert Group Meeting, Vienna : Austrian Federal Ministry for Youth and Family, 1995
- Fruin, J.A. **Nederlandse Wetboeken**, Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1996
- Gallaway, Burt & Joe Hudson (eds.) **Restorative Justice : International Perspective**, Amsterdam : Kluger Publications, 1996
- Giallombardo, Rose, **Juvenile Delinquency**, a Book of Reading, (2nd edi- tions, New York : John Willey and Sons Inc. 1972
- Hadisuprpto, Paulus, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak" (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi, PDIH Undip, Semarang, 2003

_____, **"Aspek Hukum Pidana
Penanggulangan Masalah Anak dan Remaja",**
Makalah disampaikan dalam Lokakarya Penan-
ggulangan Kenakalan Anak, Semarang, 2002

_____, **"Masalah Anak dan Kejahatan :
Pemahaman Perilaku Delinkuensi Anak",**
Makalah disampaikan dalam Penataran
Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi,
Pandaan, 2002

_____, **"Perilaku Delinkuensi Anak dan
Perubahan Sosial ",** Makalah disampaikan
dalam **Sarasehan Nasional** tentang
Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja,
Jakarta : 2002

_____, **"Perlindungan Anak : Masalah
dan Legislasi",** Makalah disampaikan dalam
Forum **Pembahasan dan Pematangan Materi**
RUU Perlindungan Anak, Badan Legislatif :
DPR- RI, 2001

_____, **"Perlakuan Salah terhadap Anak
di dalam Lingkungan Keluarga"** Makalah
disajikan dalam Seminar Regional Kekerasan
terhadap Anak, Semarang, 2001

_____, **Juvenile Delinquency,
Pemahaman dan Penanggulangannya,**

Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997

_____, "Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja di Kota Madia Semarang" Laporan Penelitian Mandiri, Lembaga Penelitian Undip, 1996.

_____, "Ikatan Sosial sebagai Faktor Delinkuensi Anak di Jawa Tengah" , Laporan Penelitian Mandiri, Lembaga Penelitian Undip, 1990-1995

_____, "Attachment and Delinquency in Javanese Society" dalam Heather Strang & Julia Vernon, (eds.) **International Trends in Crime, East meets West**, Canberra : Australian Institute of Criminology, 1992

Hadisuprpto, Paulus, "Kritiek op het Concept van Delinkuentie volgen de Controletheorie van Travis Hirschi", Paper presented in het KITLV 1989, Leiden.

Hartono, Sunarjati, **Capita Selekt Perbandingan Hukum**, Bandung : Alumni, 1982

Hauber, Albert, R, "A Dutch Perspective on Some of the Effects of Alternative Sanctions", **Crime, Law and Social Change**, 15 : 91-108, Deventer : Kluwer Academic Publisher, 1991

Hurlock, B. Elizabeth, **Development Psychology, a life Span**

approach, terjemahan Istiwidiyani & Soedjarwo,
Psikologi Perkembangan, Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2000

Koens & de Jonge, G, **Het Nieuwe Strafrecht en
Strafprocesrecht voor Jeudigen**, Arnhem :
Gouda Quint, bv, 1995

Kompas, tanggal 12 Januari 1989, Jakarta : Kompas, 1989

Lemert, M. Richard, **Concept and Theories of Human
Development**, Massachusetts : Addisson
Wessley Pub. Co. 1976

Maguire, Mike, Rode Morgan, & Robert Reiner (eds.) **the Oxford
Handbook of Criminology**, London : Oxford
University Press, 2002

Muladi, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi
Hukum di Indonesia**, Taftazani (ed) Jakarta :
Habibie Center, 2002

_____, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem
Peradilan Pidana**, Semarang : BP Undip, 1997

_____, **Kapita Selekta Sistem Peradilan
Pidana**, Semarang : BP Undip, 1995

Nawawi Arief, Barda, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada, 2002

_____, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996

_____, 'Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan"
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional
"Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan" Semarang, 1996

Packer, L. Herbert, **The Limits of the Criminal Sanction**,
Stanford, California : Stanford University Press,
1968

PULLAHTA, Mabes POLRI, Desember 1997.

Soerjono Soekanto, **Perbandingan Hukum**, Bandung : Alumni,
1979.

Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**,
Bandung : Alumni, 1983

_____, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung :
Alumni, 1977

_____, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung
: Alumni, 1981

Suparno, Paul, **Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget**,
Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1983, **A Compilation of International Instruments**, Volume I (First Part) Universal Instruments, New York : United Nations, 1993.

Walgrave, L, "Beyond Retribution and Rehabilitation : Restoration as the Dominant Paradigm in Judicial Intervention against Juvenile Crime", Amsterdam : Kluger Publication, 1993.

White, Rob & Chris Cunneen, **Juvenile Justice**, Youth and Crime in Australia, Melbourne : Oxford University Press, 2003.

Winterdijk, John (ed.) **Juvenile Justice Systems, International Perspectives**, Toronto : Canadian Scholars' Press Inc. 1997

Zehr, H, **Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice**, Scotdale : PA. Herald Press, 1990.

DPR-RI, **Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak**, Jakarta : DPR-RI, 1996.

Lembaran Negara RI tahun 1997 No. 3, - **Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, Jakarta ; Sekretariat Kabinet, . 1997

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi :

1. Nama : Paulus Hadisuprpto
2. NIP : 130531702
3. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV C
4. Tempat & Tgl. Lahir : Sala, 21 Juli 1949
5. Agama : Katolik Roma
6. Isteri : Elizabeth Budi Nastiti
7. Anak-anak : 1. Agnes Siwi Adyati Puruhita
2. Robertus Seta Dyaksa Hanindya
8. Alamat : Jl. Dewi Sartika IV/77
Komplek Undip Semarang, 50221

II. Pendidikan Formal

1. SR. Gondowidjajan, Surakarta Lulus tahun 1961
2. SMP Negeri II Surakarta Lulus tahun 1964
3. SMA Negeri III Surakarta Lulus tahun 1967
4. Fakultas Hukum Undip Lulus tahun 1975
5. Pascasarjana KPK UI-Undip Lulus tahun 1988
6. Program Doktor Ilmu Hukum Undip Lulus tahun 2003

III. Pendidikan Tambahan

1. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, YIS, Jakarta, 1977
2. Penataran Pengembangan Metode Pengajaran di UNDIP tahun 1978
3. Program Akta Mengajar V Format Belajar Jarak Jauh, tahun 1981/82
4. Penataran Nasional Kriminologi, di UNAIR, Pandaan, Jatim, 1987
5. Penataran Rekonstruksi Kuliah Angkatan ke III di UNDIP, tahun 1988

6. Kursus Bahasa Belanda di Erasmus Huiz, Jakarta, tahun 1988
7. Sandwich Fellow, di Universitas Leiden, Belanda, tahun 1988

IV. Riwayat Jabatan

a. Riwayat Kepegawaian

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Calon Pegawai | : III a Tahun 1976 |
| 2. Penata Muda | : III a Tahun 1977 |
| 3. Penata Muda Tk I | : III b Tahun 1978 |
| 4. Penata | : III c Tahun 1980 |
| 5. Penata Tk I | : III d Tahun 1983 |
| 6. Pembina | : IV a Tahun 1986 |
| 7. Pembina Tk I | : IV b Tahun 1990 |
| 8. Pembina Utama Muda | : IV c Tahun 1994 |

b. Riwayat Jabatan

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Asisten Ahli Madya | : Tahun 1977 |
| 2. Asisten Ahli | : Tahun 1978 |
| 3. Lektor Muda | : Tahun 1980 |
| 4. Lektor Madya | : Tahun 1983 |
| 5. Lektor | : Tahun 1986 |
| 6. Lektor Kepala Madya | : Tahun 1990 |
| 7. Lektor Kepala | : Tahun 1994 |
| 8. Guru Besar | : Tahun 2005 |

V. Pengalaman Jabatan

Di lingkungan UNDIP

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Undip | Tahun 1993-1996 |
| 2. Sekretaris Pascasarjana KPK UI-UNDIP | Tahun 1990-1992 |

3. Staf Khusus Program Doktor Ilmu Hukum
UNDIP

Tahun 2004-
2005

4. Ketua Badan Perencanaan &
Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP

Tahun 2004-
kini

Di luar UNDIP

1. Penasehat Akademik Fakultas Hukum
Unika Soegijopranata, Semarang

Tahun 1982-
1992

2. Penatar Kriminologi pada Penataran
Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi.

Tahun 1997-
1988

3. Anggota Tim Penyusunan Draft
(RUU Pencucian Uang, Departemen
Kehakiman RI)

Tahun 1999-
2000

4. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.

Tahun 2005-
kini

VI. Kepengurusan dan Keanggotaan Organisasi Profesi

1. Sekretaris Pusat Asosiasi Pengajar
Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia
(ASPEHUPIKI)

Tahun 1989-kini

2. Anggota Asosiasi Kriminologi Indonesia
(AKI)

Tahun 1990-kini

3. Anggota DPD Forum Komunikasi
Akademisi dan Praktisi
Hukum Indonesia (FORKAPHI)

Tahun 2003-kini

VII. Tanda Penghargaan

1. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Teladan III Fakultas Hukum UNDIP Tahun 1985
2. Satya Lencana Dwidja Sista dari Menhankam Tahun 1980
3. Satya Lencana Karya Satya XX dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2000
4. Piagam Penghargaan 25 tahun Mengabdikan di Universitas Diponegoro dari Rektor UNDIP Tahun 2002

VIII. Pengalaman Penelitian

1. Penelitian "Tingkat Kemampuan Finansial dan Tingkat Kepuasan LBH DKI Jaya, YIS, Jakarta Tahun 1977
2. Penelitian "Sosial Ekonomi Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, PRP Undip & A/D/C Tahun 1978-1980
3. Penelitian "Peranan Wanita di Pedesaan Jawa Tengah" PRP Undip & A/D/C Tahun 1980-1982
4. Penelitian "Ikatan Sosial dan Delinkuensi Anak di Jawa Tengah", Lemlit UNDIP Tahun 1990-1995
5. Penelitian "Persepsi Perilaku Penyimpangan di Kalangan Remaja di Jawa Tengah, Lemlit UNDIP Tahun 1995
6. Penelitian "Wilayah Kumuh Perkotaan dan Desa Tertinggal dan Kejahatan

- di Jawa Tengah" Lemlit UNDIP & BAPPEDA Jawa Tengah Tahun 1996
7. Research on "the Common Roots and Its Development of Criminal Law" in the Netherlands, Leiden University & Konsorsium Ilmu Hukum Dirjen Dikti, Depdikbud, Tahun 1999

VIII. Kegiatan dalam Seminar/Simposium/Lokakarya

1. Pembicara dalam "International Conference on Crime, East meets West" Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) Dirjen Dikti, Depdikbud RI – Belanda dan Australia, Bali, 1991
2. Pembicara dalam "Seminar on Urban Crimes" Departemen Kehakiman RI – Jakarta, 1992
3. Moderator on "the Human Rights National Workshop II, 1996", KOMNAS HAM & the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Swedia, Jakarta, 4 – 7 Desember 1996
4. Panelis pada "Seminar Nasional Peradilan Anak" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996
5. Peserta "International Workshop on Crimes against Humanity" – Kejaksaan Agung, Jakarta, 2001
6. Penatar Kriminologi pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI & Universitas Surabaya, 2003
7. Moderator pada Seminar Nasional "Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak" UI – UNICEF, Jakarta, 2003
8. Panitia Pengarah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI & Universitas Surabaya, Surabaya, 2005

9. Penatar Metode Penelitian Hukum pada "Penataran Metode Penelitian Hukum Dosen-dosen", Fakultas Hukum Universitas Br̄awidjaja, Malang, 2004
10. Panelis pada "Lokakarya Pembakuan Metode Penelitian Hukum", Fakultas Hukum, Universitas Brawidjaja, Malang, 2005.

IX. Publikasi Ilmiah

1. "Attachment and Juvenile Delinquency in Javanese Society", dimuat dalam *International Conference on Crime, East meets West, (Seminar Proceeding)* Canberra : Australian Institute of Criminology, - 1992
2. Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997
3. "Kecenderungan Perilaku Kriminal di wilayah Kumuh Perkotaan dan De sa Tertinggal", dimuat dalam Majalah Masalah-masalah Hukum ISSN 0126-1389, tahun 2000.
4. "Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", dimuat dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, ISSN : 0126-1389, tahun 2000
5. "Pembangunan Hukum Indonesia dalam Visi Global", dimuat dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, tahun 2000
6. "Perlindungan Anak : Masalah dan Legislasi" Makalah disampaikan dalam Forum Pembahasan dan Pematangan Materi RUU Perlindungan Anak, Badan Legislatif, DPR – RI, tahun 2001
7. "Pemberian Malu : Alternatif Antisipatif KKN" dimuat dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, ISSN 1411-6332, tahun 2002
8. "Kejahatan Bisnis dan Antisipasinya" dimua dalam Majalah

Ilmiah UNISBANK, Semarang, vol. 1, No. 3 tahun 2002

9. "Civil Law System" (Studi Penelusuran Karakter Sistem Hukumnya), di muat dalam Jurnal Hukum ISSN 1442-2373 tahun 2004
10. Beberapa artikel dalam Harian KOMPAS, :
 - "Keluarga dan Transformasi Sosial", dimuat tgl. 22 Juli 1994
 - "Asta Citra Anak Indonesia : Komitmen Masa Depan Anak Indonesia" dimuat, tgl. 22 Juli 1994
 - "Disorganisasi Sosial dan Perilaku Remaja" dimuat, tgl. 22 Feb.i 1994
 - "Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan Bisnis, dimuat, tgl. 9 April 1994
 - "Dari Sangkar ke Sanggar", dimuat, tgl. 28 April 1994

————— o0o —————